

Pergulatan Agama Agama Di Tengger

Paring Waluyo Utomo

Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan

AVERROES

Malang

Abstraksi

Wilayah Tengger merupakan area yang masih memegang teguh tradisi ketenggeran. Walau di “invasi” oleh berbagai agama-agama besar seperti Hindu, Budha, dan Islam. Identitas ketenggeran yang telah mentradisi di tengger mampu melakukan dialetika kebudayaan. Bahkan identitas ketenggeran mampu bersiasat dan melakukan resistensi terhadap berbagai kultur dominan yang mengepungnya itu. Masuknya Agama-Agama besar seperti Hindu, Budha dan Islam ke Tengger yang diformalkan oleh pemerintahan orde baru ternyata oleh orang Tengger hanya diletakkan dalam display kebudayaan mereka. Sementara dalam praktek kebudayaan sehari-hari, mereka memainkan (play) ritus-ritus ketenggeran yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Melalui ritus-ritus ketenggeran itu pula masyarakat tengger membangun identitas untuk menentukan peta kulturalnya.

Sejarah Orang Tengger

Kawasan Pegunungan Tengger merupakan kawasan yang berada di empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. Kawasan Tengger sendiri berjarak sekitar 200 km dari Kota Surabaya menuju ke arah timur. Karena berada di kawasan pegunungan, maka kawasan Tengger sendiri cenderung berhawa sejuk. Masyarakat sekitarnya setiap hari mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam yang merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang mereka. Disamping cocok tanam, tradisi yang masih dipegang erat sebagai warisan leluhur mereka, orang tengger juga menempatkan Gunung Bromo sebagai pusat spiritualitasnya. Bahkan hanya dengan menjaga kesucian Gunung Bromo inilah orang-orang Tengger masih tetap eksis hingga kini, walau dikepung oleh agama-agama baru yang masuk didaerah ini.

Munculnya keberadaan komunitas Tengger yang menghuni lereng Gunung Bromo hingga kini masih menjadi perdebatan dikalangan sejarawan. Dari catatan yang dibuat oleh Hefner (1985: 25) menyebutkan bahwa ada prasasti yang diperkirakan dibuat pada tahun 851 Saka (929 M). Didalam prasasti yang dikenal dengan nama Walandhit itu diilustrasikan bahwa di



pegunungan Tengger terdapat sebuah tempat suci yang dihuni oleh para *hulun*, yaitu orang yang menghabiskan waktunya demi menjadi abdi dewa. Namun Hefner sendiri berpendapat bahwa cikal bakal orang Tengger adalah para pelarian Kerajaan Hindu-Budha di Jawa setelah arus Islamisasi yang kian kuat.

Dalam catatan pribadi yang dibuat oleh Mujono, Koordinator dukun seluruh kawasan Tengger dan juga dukun di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo (2002) menyebutkan pada tanggal 19 Februari 2002 diketemukan sebuah prasasti dengan nama Prasasti Pramai Suara Pura dengan tahun 1197 Saka (1275 M) di Desa Tegal Rejo. Prasasti ini menurut Mujono dibuat pada masa Kerajaan Singasari. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Sri Kertanegara dari Kerajaan Singasari menurunkan perintah kepada tiga maha menteri dan patih Anggraeni Geni. Perintah itu berupa pembebasan pajak untuk tanah di pegunungan Tengger, namun disuruh melaksanakan persembahan kepada yang diatas. Dalam melakukan persembahan sarana yang dipakai adalah tumpeng, ayam, itik, dan telur dipecah, uang emas, uang perak. Dan masyarakat disuruh menjaga bangunan berupa Prame Suara Pura. Didalam prasasti itu juga berisi sabda raja jika tidak melaksanakan titah itu akan di sambar petri, dimakan ular berbisa, dimakan harimau, dan dibawa banjir.

Namun Mujono sendiri berkeyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger itu ada semenjak Kerajaan Mataram Kuno ada di Jawa Tengah. Walau belum diketemukan bukti tertulis mengenai asumsi ini, Mujono merujuk pada dialek kebahasaan yang dipakai oleh orang-orang Tengger saat ini sama dengan dialek orang-orang Banyumas serta mengacu pada tata cara ritual yang mereka jalankan itu sangat kuno sekali. Sementara Kerajaan Mataram Kuno sendiri diperkirakan berada di daerah Banyumas dan sekitarnya hingga ke Magelang. Kerajaan Mataram Kuno sendiri merupakan kerajaan yang ada di Jawa munculnya sebelum Hindu dan Budha.

Saat memasuki masa Majapahit wilayah Tengger dijadikan tempat suci yang spesial. Penghormatan terhadap wilayah Tengger juga diberikan oleh Kerajaan Majapahit. Dalam tulisannya Pigeaud (1960:228), nama Walandhit disebutkan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Walandhit adalah sebuah nama tempat suci yang sangat dihormati oleh Kerajaan Majapahit. Dipegunungan Tengger itu bermukim seorang suci yang dikenal dengan *Sidhapandita*, yakni seorang yang telah sempurna ilmunya.



Keberadaan orang-orang Majapahit ke Tengger sendiri bukanlah bagian dari integral dengan Tengger. Dalam tulisannya yang lain, Pigeaud dan De Graaf (1985) menyebutkan nenek moyang orang Tengger bukanlah pengungsi dari Majapahit. Orang Walandhit (Tengger) merasa seiman dalam segi keagamaan yang bercorak Hindu-Budha, dan senasib sepenanggungan dalam arti sama-sama terancam oleh arus Islamisasi yang dilakukan oleh Demak, terutama setelah mengetahui Demak berhasil mengislamkan sekitar Tengger. Melihat kenyataan itu, maka keduanya bersama-sama berjuang melawan bala tentara Demak.

Tulisan lain yang mencoba menjelaskan keberadaan masyarakat Tengger adalah etnografi yang dibuat oleh Raffles, sebagaimana yang dikutip oleh Donal Weatherbee (1978). Dalam tulisannya itu Thomas Stamford Raffles menyebutkan bahwa orang-orang Tengger merupakan anak cucu dari Jaka Sager (penduduk asli Tengger) dengan Rara Anteng (Putri dari Kerajaan Majapahit, yakni dari Raja Brawijaya V). Akibat perkawinan keduanya mereka dikaruniai anak sebanyak 25 orang dan anak yang terakhir yang bernama Dewa Kusuma dikorbankan di Gunung Bromo sebagai janji kedua pasangan ini jika mereka mendapatkan keturunan.

Namun versi Raffles ini mendapatkan banyak kritik dari sejarawan kontemporer Indonesia saat ini. Diantaranya Dwi Cahyono, Ketua Ikatan Arkeologi Indonesia Wilayah Jawa Timur yang menyebutkan bahwa mitos dari Jaka Seger dan Rara Anteng tak lebih dari upaya Hinduisasi dari Kerajaan Majapahit terhadap orang-orang Tengger. Cerita ini walau sejatinya bukan produk ortogenik Tengger namun kenyataannya sangat berhasil ditanamkan sebagai bagian dari kisah Tengger yang terjaga hingga kini.

Sekelumit versi mengenai keberadaan orang-orang Tengger diatas setidaknya menjadi bayang-bayang kita untuk meraba kesejarahan yang ada di Tengger. Walau belum ada sejarah yang dapat dijadikan patokan kuat untuk dijadikan pegangan. Dari perdebatan singkat dari kalangan sejarawan diatas membantu kita untuk membaca orang Tengger.

Politik-Kebudayaan Tengger Kontemporer

Tengger dewasa ini merupakan salah satu wilayah primadona, tidak saja oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Tengger juga bak lautan penuh dengan ikan segar bagi



berbagai kekuatan kultural yang ada diluarnya untuk berbondong-bondong menjalannya untuk dijadikan produk olahan mereka. Berbagai “invasi” yang dilancarkan terhadap komunitas Tengger seolah silih berganti tiada henti bahkan hingga kini.

Sejak tahun 1968 sebagaimana kesaksian Mujono, Dukun Desa Ngadas [*Lor*], Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, wilayah Tengger banyak didatangi oleh para peneliti gabungan yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Hindu-Budha dan Ikatan Hindu Darma di Bali. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa tata cara ritual yang ada di Tengger oleh mereka disamakan dengan tata cara ritual oleh orang Hindu. Sebelumnya memang mayoritas warga Tengger sama sekali tidak mengenal istilah Hindu dalam ritualitas kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kesaksiannya terhadap penulis (alm) Soeja’i maupun Mujono menyatakan bahwa masyarakat Tengger menyembah atma para atma, yakni roh-roh leluhur, dan tidak mengenal konsep kehinduan seperti sekarang ini. Akhirnya pada tahun 1973 wilayah Tengger secara keseluruhan ditetapkan sebagai penganut Agama Hindu oleh Pemerintah Orde Baru yang baru seumur jagung. Berbarengan dengan hal itu Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Jawa Timur membuat Surat Keputusan No. 00/SK/PHDI-Jatim/1973 mengenai pembentukan kepengurusan PHDI Cabang Kabupaten Probolinggo yang diketuai oleh (alm). Soeja’i (Koordinator Dukun Tengger waktu itu). Sebagai konsesi atas menurutnya warga Tengger untuk diformalkan sebagai pemeluk Hindu, maka tokoh Tengger yang juga Koordinator Dukun seluruh Tengger (alm) Soeja’i waktu itu dijadikan anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo oleh pemerintah orde baru waktu itu hingga dua kali berturut-turut. Dan pada waktu itu pula sesuai dengan keterangan (alm) Soeja’i masyarakat Tengger hampir seratus persen mencoblos Golkar.

(alm) Soeja’i memiliki alasan kenapa warga Tengger ikut dalam barisan Golkar waktu itu. Ia menyatakan dengan ikut Golkar maka kehidupan orang Tengger dengan segenap kebudayaannya akan dapat terselamatkan. Sebab pasca tragedi G 30 S tahun 1965 terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang Tengger, khususnya di wilayah Tengger bagian Pasuruan dan Probolinggo.

Sebagai langkah tindak lanjut dari penerapan ajaran Hindu di Tengger, pemerintah orde baru mengirimkan beberapa tenaga pengajar yang diambil dari luar Tengger untuk mengajarkan pendidikan Agama Hindu secara formal disekolah-sekolah yang ada diseluruh kawasan



Tengger. Diantara sekian banyak guru pengajar Agama Hindu yang ada di Tengger adalah Sarmidi. Pria kelahiran Blitar yang fasih mengajarkan Hindu Darma ini masuk ke Tengger tahun 1979. Ia ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu untuk menjadi tenaga pengajar di Tengger, khususnya di SDN Wonkerto I, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Guna semakin menegaskan kehinduannya di tengger, PHDI Bali bahkan memberikan fasilitas bagi beberapa warga Tengger untuk mendapatkan pendidikan Agama Hindu di Bali. Salah satu orang yang mendapatkan beasiswa dalam bersekolah di Institut Hindu Darma (IHD) di Bali adalah Bambang Suprpto. Ia merupakan siswa yang diambil dari Tengger sekaligus angkatan pertama yang disekolahkan di IHD. Bambang suprpto sendiri menjalani pendidikan di IHD pada angkatan tahun 1980 an.

Pada tahun 1980 an ini pula, tepatnya pada tahun 1989 pemerintah waktu itu membangun pura pertama yang ada di Tengger. Pura pertama itu dibangun di Desa Ngadas [lor]. Pembangunan pura di Desa Ngadas [lor] ini sekaligus membelakangi bangunan sanggar pamujan yang ada di desa tersebut. Pada tahun berikutnya semakin banyak pula pura yang dibangun diseluruh kawasan Tengger. Puncaknya pada tahun 1996 pemerintah membangun Pura di Poten. Poten adalah tempat persembahyangan utama bagi orang-orang Tengger. Tempat persembahyangan ini digunakan oleh orang-orang Tengger sebagai puncak Upacara Kasada. Poten sebelum dibangun tahun 1996 hanya bangunan mirip pondasi rumah yang letaknya di padang pasir yang ada disamping kawah Gunung Bromo.

Intensitas peng-Hindua-an terhadap orang-orang Tengger yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan PHDI berjalan dengan mulus. Berbagai upacara sakral yang ada dalam Agama Hindupun segera diperkenalkan dan diajarkan di Tengger. Upacara-upacara seperti Galungan, Kuningan, maupun Nyepi mulai dilakukan oleh orang-orang Tengger. Tak lupa pula, dukun se kawasan Tengger dimasukkan kedalam keanggotaan PHDI, bahkan menjadi pengurus penting didalamnya.

Dalam pengalaman Sarmidi saat mengajarkan pendidikan Agama Hindu di SDN Wonokerto I, ia banyak mengalami kesulitan-kesulitan, sebab banyak anak-anak Tengger yang tidak memiliki dasar-dasar pemahaman Agama Hindu. Ia merasa harus tut wuri handayani atau



memberikan contoh terlebih dulu kepada masyarakat Tengger dalam mengenalkan konsep Agama Hindu. Ia memang tak dengan serta merta dapat mempribumikan ke-Hindu-an kepada masyarakat Tengger. Pekerjaannya sebagai pengajar Agama Hindu merasa kian terbantu ketika ia mendapatkan sokongan dan dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah desa tempat ia bertugas. “ Kepala desa di Tengger ini ibaratnya memiliki *idu geni* atau pengaruh yang kuat. Sehingga seluruh perintah dan ucapannya akan dilaksanakan oleh warganya”, ungkap Sarmidi. Orang Tengger dalam pandangan Sarmidi dalam menjalankan keberagamaannya saat awal ia masuk masih sangat sederhana dan terkesan sekedarnya saja.

Bagi Sarmidi dan guru-guru pengajar Agama Hindu, maupun para Bedande yang mengajarkan Agama Hindu di Tengger menganggap dirinya sebagai mesiah atau juru penerang bagi masyarakat Tengger. “Saya ini dianggapnya sebagai juru penerang saja, karena orang Tengger sebelumnya belum mengenal agama (Hindu) seperti sekarang ini”, ujar Sarmidi.

Demikianlah hari demi hari banyak anak-anak muda Tengger yang terus mendapatkan gemblengan dari para pemuka Tengger. Antara ketenggeran dan kehinduan terus melakukan kontestasi, saling bersiasat untuk beragumen, dan kadangkala bersinkretik untuk menjalani dialektika kebudayaan.

Pergulatan orang-orang Tengger sejatinya tidak saja dengan Hindu. Bahkan sebelum Hindu secara formal diresmikan masuk ke Tengger oleh pemerintah orde baru, beberapa desa di Tengger khususnya Tengger kawasan Probolinggo, seperti Desa Sukapura, Desa Sapikerep, dan Desa Wonokerto para penduduknya telah menganut Agama Islam. Dalam keterangannya kepada penulis, Ruslandi Haryono, Sekretaris Desa, Wonokerto menuturkan bahwa gelombang Islamisasi di Tengger, khususnya di Wonokerto dijalankan melalui dua tahapan. Tahap pertama, Islamisasi di tengger dilakukan oleh Kyai Dadap Putih dan para pengikutnya yang merupakan bala tentara Demak. Saat itu Demak yang telah memeluk Islam telah meluluhlantakkan Kerajaan Majapahit yang Hindu. Sebagian orang-orang Majapahit itu melarikan diri ke Tengger dan bergabung dengan masyarakat Tengger membangun pertahanan di lereng Gunung Bromo.



Namun, Demak waktu itu memiliki obsesi untuk mengislamkan wilayah Tengger, dan juga menyerang sisa-sisa pengikut Majapahit yang bersembunyi di Tengger. Maka dikirimlah Kyai Dadap Putih ke Tengger yang bertugas untuk mengislamkan bala tentara Majapahit dan orang-orang Tengger. Dalam penuturannya, Ruslandi Haryono memang belum bisa menggambarkan tentang prestasi keislaman yang dikibarkan oleh Kyai Dadap Putih terhadap orang-orang Tengger.

Sementara gelombang kedua Islamisasi di Tengger tahap kedua dilakukan oleh Embah Raden. Embah Raden ini sekaligus sebagai kepala desa pertama di Wonokerto, dan kalau dihitung sampai sekarang telah mencapai lima generasi. Dalam perkiraan Ruslandi, Embah Raden yang berasal dari Kediri itu masuk ke Wonokerto dengan beradu ilmu kesaktian dengan dukun wonokerto waktu itu. Sebagai taruhan dari pertarungan itu adalah barang siapa yang memenangkan pertarungan itu, maka ia berhak untuk mengajak seluruh warga wonokerto untuk mempelajari ilmu, utamanya ilmu agama kepada pihak yang menang. Maka segeralah pertarungan itu dimulai, Embah Raden berhasil memenangkan pertempuran itu, sebagai konsekuensinya Embah Raden meminta warga Wonokerto untuk memeluk Agama Islam.

Upaya Embah Raden untuk mengislamkan masyarakat ternyata tidak hanya di Desa Wonokerto semata, ia memiliki obsesi untuk mengislamkan seluruh warga Tengger. Namun sebelum niatnya itu kesampaian. Beberapa dukun Tengger yang berada dari desa-desa diatas Wonokerto seperti Ngadas [*lor*], Jetak, Wonotoro, maupun Ngadisari mendatangi Embah Raden untuk diajak adu kesaktian dan meminta restu danyang Bromo. Barang siapa yang paling sakti dan dapat restu dari danyang di Gunung Bromo, maka ia yang berhak untuk mewarnai kehidupan masyarakat Tengger.

Saat pertarungan itu akan dimulai, ternyata Embah Raden tak dapat bangkit dari tempat duduknya, bahkan ia tak dapat menggerakkan tubuhnya. Akhirnya, Embah Raden mengakui kesaktian para dukun Tengger itu. Dan Embah Raden mengurungkan niatnya untuk mengislamkan desa-desa Tengger diatas Wonokerto. Begitulah cerita lisan yang berkembang hingga kini dikalangan sesepuh Desa Wonokerto. Bahkan cerita ini juga dibenarkan oleh Mujono, dukun Ngadas Tengger.



Kini diabad modern, arus Islamisasi di Wonokerto terus berlangsung dengan intensifnya. Bahkan upaya untuk mengajarkan Islam secara menyeluruh [*kaffah*] di Wonokerto dilakukan oleh beberapa guru dan ustad pengajar Agama Islam didatangkan dari luar desa ini. Diantaranya adalah Suparni, guru pengajar pendidikan Agama Islam di Wonokerto I dan Ustad Ja'far, seorang kyai muda yang berasal dari Pondok Pesantren Abdul Qodir Jaelani, Kraksan, Probolinggo

Menurut Ruslandi untuk mengurangi tradisi ketenggeran yang masih kuat dipegang oleh warga Wonokerto walaupun telah memeluk Islam, pada tahun 1979 dikirim guru pendidikan Agama Islam. Dan pada tahun 1980 dibangun sebuah mushola sebagai tempat ibadah warga Wonokoerto. Mushola ini sebagai tempat pengganti sanggar pendanyangan yang ada di Wonokerto yang biasanya masih dipakai warga untuk meminta permohonan. Pada tahun ini pula menurut Ruslandi, pemerintahan desa mengganti peran dukun menjadi modin dan kyai untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan ritualitas warga. Sebagai simbol mundurnya Dukun Marsudi, maka perangkat desa juga menebang dahan pohon yang ada ditempat pendanyangan dan membongkar kuburan tua yang biasa dipakai oleh warga untuk menaruh sesaji dalam upacara leliwet. Sementara itu kesenian yang telah mentradisi di Wonokerto seperti tayuban oleh perangkat desa telah diupayakan untuk diganti menjadi terbang jidor.

“Kami ingin melakukan potong generasi, biarlah orang-orang tua yang ada didesa ini kurang yang kurang pemahamannya terhadap Islam, akan tetapi yang masih muda, terutama anak-anak tidak mengalami keterbelakangan dalam memahami Islam”, ujar Ruslandi dengan tegas.

Guru Suparni kepada penulis menegaskan bahwa para pemeluk Islam di Wonokerto masih belum mengerti tentang ajaran Islam. “ Tujuan saya masuk ke Tengger ini disamping karena tugas kedinasan, saya ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Wonokerto ini”, ungkap Suparni memulai pembicaraan.

Gerakan Suparni dalam mengajarkan syariat Islam kepada warga Desa Wonokerto memang diakuinya sangat lambat dan harus pelan-pelan dengan melakukan pendekatan yang intensif. Karena ketekunannya itulah dia hingga kini telah mendapatkan sekitar 60 orang murid yang didiknya mempelajari Islam. Bahkan yang lebih membanggakan dirinya, ia telah mempunyai



seorang kader yang berasal dari Wonokerto yang telah dapat memimpin sholat tatkala ia tinggal pergi.

Pekerjaannya sebagai pendakwah Agama Islam kian mudah ketika setahun tinggal disana ia dipercaya oleh perangkat desa untuk masuk dalam keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada tahun 1987. Karena posisinya di LMD itulah yang akhirnya memudahkan Suparni untuk dekat dengan perangkat desa, yang pada akhirnya sangat membantu tugas-tugas dia. Setelah empat tahun tinggal di Wonokerto, Suparni yang disokong oleh perangkat desa baru bisa mengajak warga untuk sholat jumat. Dan mengajak warga menunaikan sholat walaupun masih sebatas Magrib dan Isya'.

Kini setelah dua puluh tahun Suparni dan kawan-kawannya mengajarkan agama, perkembangan Islam di Wonokerto mengalami lompatan yang luar biasa. Setidak-tidaknya. Telah terdapat empat buah masjid disetiap dusun yang ada di Wonokerto. Bahkan setiap bulan sekali warga diajak bermanakiban di Ponpes Abdul Qodir Jaelani di Kraksaan, Probolinggo atas biaya desa dan Ponpes Abdul Qodir Jaelani sendiri.

Ungkapan mengenai kemajuan Islam di Wonokerto juga disampaikan oleh Ustad Ja'far. Menurut kyai muda yang telah bertahun-tahun tinggal di Arab ini melihat bahwa konsep keislaman warga Desa Wonokerto masih terbelakang. Ia memperkirakan sekitar 80 persen warga desa masih belum menjalankan syariat Islam. Salah bukti yang ia kemukakan adalah kegemaran warga setiap Jumat Legi pergi ke tempat pendayangan untuk memberikan sesaji. Untuk menghindarkan warga dari jurang kekufuran, maka ia mengikuti keinginan warga itu ke danyang, akan tetapi ditempat itu ia memimpin tahlilan bersama, dan memanjatkan do'a-do'a Islam.

Ustad Ja'far mengakui ia harus sangat berhati-hati dalam mengajarkan Islam. Ia harus memudahkan konsep keislaman agar warga tidak mudah tersinggung. Kedepan ia bersama-sama dengan para pemuka Islam dan perangkat desa berobsesi untuk mendirikan pondok pesantren di Wonokerto, sekaligus mendakwahkan Islam keseluruh Tengger. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa dakwah yang akan ia sampaikan adalah dakwah yang tidak memaksa, karena memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama kepada orang yang telah beragama dapat melanggar peraturan.



Demikianlah berbagai produk-produk kebudayaan impor itu masuk ke Tengger. Kini orang-orang tengger dihadapkan pada pilihan-pilihan kebudayaan yang kian deras tekanannya. Mungkinkah orang-orang Tengger dapat bebas menentukan kedaulatan untuk memilih atau bahkan tidak memilih sama sekali dari gelombang kebudayaan yang masuk kewilayahnya? Mungkinkah orang-orang Tengger akan menjadi komodifikasi dari arus besar itu tanpa bisa berbuat apapun juga? Tentu waktulah yang akan menjawabnya.

Konstruksi Ketenggeran: Sebuah Arena Perebutan Makna

Identitas ketenggeran merupakan wilayah yang secara geo-kultural dari hari ke hari mengalami penyempitan. Kalau kita melacak wilayah Tengger sebagai wilayah suci yang memiliki kedaulatan tersendiri dengan merujuk pada Prasasti Walandhit, maka wilayah Tengger [identitas ketenggeran] secara geo-kultural meliputi wilayah yang amat luas, hingga ke lereng bawah pegunungan Tengger. Peta Tengger ini pula yang sering dipakai oleh Hefner (1985) untuk menggambarkan wilayah Tengger. Wilayah itu meliputi Desa Tumpang, Poncokusumo, Gubuklakah, dan Ngadas [*kidul*] untuk wilayah Tengger Malang. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo, wilayah Tengger itu meliputi Desa Sukapura, Sapikerep, Wonokerto, Wonorejo, Ngadas [*lor*], Jetak, Wonotoro, dan Ngadisari. Sementara wilayah Tengger di Kabupaten Pasuruan meliputi Desa Puspo, Kedawung, Tosari, Wonokitri, dan Ngadiwono. Dan untuk wilayah Tengger di Kabupaten Lumajang meliputi Desa Argosari, dan Desa Wonokerso.

Peta wilayah Tengger yang dibuat oleh Hefner diatas pada perkembangannya paling mutakhir agaknya perlu untuk dikaji ulang. Dinamika kultural telah mengakibatkan wilayah Tengger menjadi wilayah yang kian mengecil secara geo-kultural. Ada beberapa argumentasi yang diajukan oleh orang-orang Tengger maupun orang-orang yang tinggal di desa yang dulunya dianggap Tengger tentang wilayah Tengger itu sendiri. Dalam kasus konstruksi identitas ketenggeran di Kabupaten Malang misalnya ada perdebatan yang begitu sengit mengenai wilayah Tengger. Masyarakat di Desa Ngadas [*kidul*] menyatakan bahwa wilayah Desa Gubuklakah kebawah bukan lagi wilayah Tengger. Sebab desa-desa di telah meninggalkan tradisi Tengger dengan menganut agama baru [baca; mayoritas Islam] yang tidak toleran [*negosiabile*] terhadap tradisi Tengger. Demikian pula sebaliknya masyarakat di Desa Gubuklakah juga tidak mau dikategorikan sebagai masyarakat Tengger. Sebab dalam



imajinasi mereka, ketika dianggap sebagai bagian dari masyarakat Tengger, orang-orang Desa Gubukklakah sendiri bisa terjerumus dalam jurang *kemusyrikan*. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka anut dan secara stigmatif membuat citra buruk.

Ketika di definisikan sesat oleh orang-orang Gubukkalah, maka orang-orang Ngadas [*kidul*] membangun kontruksi sendiri mengenai kemampuan Tengger untuk bernegosiasi dengan agama apapun yang hidup didesa ini. Kontruksi ini digunakan oleh orang-orang Desa Ngadas [*kidul*] untuk menunjukkan ‘superioritas’ Tengger, cara ini digunakan untuk meruntuhkan label sesat yang diproduksi oleh orang-orang luar Ngadas. Di Desa Ngadas [*kidul*] sendiri terdapat beragam penganut ajaran agama. Didesa kecil ini terdapat penganut Islam, Hindu, Budha, bahkan Katolik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wardiono, sesepuh Desa Ngadas [*kidul*] bahwa agama apapun yang berkembang di Desa Ngadas ini, maka agama tersebut harus tetap ramah terhadap tradisi dan tata cara Tengger. Kalau orang Islam di Ngadas [*kidul*] ini meninggal dunia, maka ia tidak dikuburkan dengan kepala membujur di Utara dengan menghadap ke barat [*kiblat*], tetapi dengan kepala membujur ke selatan dengan menghadap ke timur, yakni Gunung Bromo sebagai kiblatnya orang Tengger.

Bagi Wardiono dan beberapa warga desa lainnya, masyarakat di Desa Ngadas [*kidul*] memiliki pemahaman bahwa adat Tengger itu tidak bertentangan dengan agama apapun. Potret negosiasi antara agama-agama baru yang masuk ke Tengger seperti Islam, Hindu, dan Budha dengan agama Tengger di Desa Ngadas [*kidul*] itu terlihat ketika pelaksanaan ritual Tengger, maka segenap warga desa berbondong-bondong melaksanakan ritual Tengger yang dipimpin oleh sang dukun. Dalam melaksanakan ritual itu sang dukun jelaslah bukan Islam, Hindu, maupun Budha, akan tetapi dengan menggunakan Agama Tengger. Sebaliknya, ketika masing-masing agama diatas melaksanakan ritual, maka ketenggeran tidak ambil bagian didalamnya. Sehingga bagi orang-orang Desa Ngadas [*kidul*], ketenggeran itu kompatibel dengan agama apapun.

Hal ini jelas berbeda dengan apa yang terjadi pada wilayah Tengger di Probolinggo. Desa-desa di lereng bawah seperti Desa Sukapura, Sapikerep, maupun Wonokerto tidak diakui lagi oleh orang-orang di lereng atas sebagai desa Tengger, sebab mereka telah Islam. Dan keislaman mereka tidak mau menerima eksistensi Agama Tengger ditengah-tengahnya. Sementara desa-desa di lereng atas seperti Desa Wonorejo, Ngadas [*lor*], Jetak, Wonotoro, dan



Ngadisari yang mayoritas masyarakatnya Hindu merasa masih memegang teguh Agama Tengger. Resistensi orang-orang Tengger akan segera muncul tatkala agama baru masuk ke tengger, ketika agama baru itu tidak mau kompatibel dengan Tengger sendiri. Kasus penggantian nama Desa Wonorejo menjadi Desa Putus oleh orang-orang Tengger atas merupakan contoh dari resistensi itu. Posisi Desa Wonorejo itu secara geografis dibawah Desa Wonokerto. Ketika dalam perjalanan waktu, orang-orang Wonokerto telah memeluk Islam, maka hubungan kultural dan agama antara orang-orang Wonorejo dan desa-desa di lereng atas merasa diputus. Makna putus ini dibuat untuk menandakan bahwa Wonokerto yang secara geografis memisahkan Desa Wonorejo dan Ngadas [lor] telah meng[di]eksklusi dari Tengger.

Awalnya antara warga Desa Wonokerto dengan desa-desa Tengger di atasnya terjadi konvensi. Siapapun orang Tengger [lereng atas] yang masuk ke Desa Wonokerto dan menetap di Wonokerto, maka yang bersangkutan harus memeluk Islam. Sebaliknya jika ada warga Desa Wonokerto karena alasan-alasan tertentu, seperti perkawinan, lantas yang bersangkutan tinggal di desa-desa Tengger, maka yang bersangkutan juga harus menganut tradisi Tengger. Konvensi ini dibuat ketika masa Embah Raden berkuasa di Wonokerto. Namun konvensi ini belakangan dilanggar oleh orang-orang Wonokerto. Rulandi Haryono misalnya menyatakan bahwa warga Desa Wonokerto yang karena alasan tertentu harus berpindah dan masuk ke desa-desa atas, maka yang bersangkutan boleh saja tetap memeluk Islam dan tidak harus menjalankan tradisi Tengger. Menyikapi pelanggaran konvensi ini, beberapa pemuka Tengger di lereng atas seperti Mujono, Siswo Wardono, ataupun Bambang Soeprapto menyatakan bahwa masyarakat Tengger tidak terlalu risau dengan pengingkaran itu. Hal itu oleh mereka justru dianggap sebagai pelajaran dimasa depan untuk lebih berhati-hati menghadapi kebudayaan luar yang hendak masuk ke Tengger.

Sementara di Desa Wonokerto, walaupun telah meng[di]eksklusi dari Tengger, namun beberapa warga di desa ini tetap saja tidak bisa meninggalkan tradisi Tengger. Secara formal mereka memeluk Islam [di Kartu Tanda Penduduk/ KTP], namun keislaman mereka tak lebih dari usaha untuk menyelamatkan diri dari dominasi Islam disekelilingnya. Secara diam-diam dan rutin beberapa warga desa itu bersembahyang di sanggar pendanyangan yang ada di desa ini. “Boleh saja pemuka-pemuka Islam di sini mendirikan empat buah masjid. Namun Anda bisa melihat sendiri, masjid itu kalau Hari Jumat tak seramai di sanggar pendanyangan ini”, kata seorang warga saat ditemui di sanggar pendanyangan.



Begitulah kontestasi dan perebutan makna tentang identitas ketenggeran terus saja dinamis. Orang-orang Tengger seolah tak kehabisan cara untuk menakar harga diri. Mungkin negara dan agama-agama formal merasa menang atas dominasinya diseluruh daratan Tengger. Namun negara dan agama-agama formal juga tidak bisa memungkiri bahwa identitas ketenggeran itu masuk dan berselubung didalam ruang dominasi yang dibuat oleh negara dan agama-agama formal. Inilah cara orang-orang Tengger mempertahankan identitasnya yang dihipit itu? Mungkin juga. []

* * * * *



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Edy Burhan
1996 *Dukun Dalam Masyarakat Tengger* (Suatu Kajian Antropologis). Jember. Pusat Penelitian Budaya Madura Jawa Dan Nusantara Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- De Graaf Dan Pigeaud
1985 *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*. Seri Terjemahan Javanologi No. 4 Jakarta. Graffiti Press.
- Hefner, Robert
1985 *Hindu Javanese: Tengger Traditionan Islam*. Princeton. Princeton University Press
1990 *The Political Economy of Mountain Java; An Intepretative History*. University of California Press.
- Jesper, J.E.
1962 *Tengger en de Tenggereezen*. Waltreveden. Druk van G Kolff.
- Pigeaud
1960 *Java In The 14 Century*. The Hague: Martinuz Nijhoff
- Sutarto, Ayu
1997. *Orang Tengger Dahulu Dan Sekarang*. Jember. Makalah dalam rangka Dies Natalis ke 33 Universitas Jember.
- Weatherbee. Donald E.
1978 *Raffles Sources for Traditonal Javanese*. Historiography and the Mackenzie Collection.
- Widyaprakosa, Simanhadi
1997 *Upacara Karo Dan Satya Yoga Bagi Masyarakat Tengger* (Suatu Tinjauan Filosofis Kultural). Jember. Makalah dalam rangka Dies Natalis ke 33 Universitas Jember.

DAFTAR WAWANCARA

- Wawancara dengan Soeja'i (Dukun Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo). Pada bulan Februari 2003
- Wawancara dengan Mujono (Dukun Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo). Pada Tanggal 1 Desember 2004
- Wawancara dengan Suprpto (Mantan Dukun Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo). Pada Tanggal 2 Desember 2004
- Wawancara dengan Suparni (Pengajar Pendidikan Agama Islam di SDN Wonokerto I, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo) Pada Tanggal 3 Desember 2004
- Wawancara dengan Sarmidi (Pengajar Pendidikan Agama Hindu di di SDN Wonokerto I, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo) Pada Tanggal 4 Desember 2004
- Wawancara dengan Bambang Suprpto (Pemuka Agama Hindu di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dan Alumni Institut Hindu Darma Bali) Pada Tanggal 5 Desember 2004
- Wawancara dengan Ustad Ja'far Shodiq (Pemuka Agama Islam di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dan Pengasuh Pondok Pesantren Abdul Qodir Jaelani, Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo) Pada Tanggal 6 Desember 2004



Wawancara dengan Ruslandi Haryono (Sekretaris Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo) Pada Tanggal 7 Desember 2004
Wawancara dengan Siswo Wardono (Kepala Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo) Pada Tanggal 8 Desember 2004
Wawancara dengan Dwi Cahyono (Ketua Ikatan Arkeologi Jawa Timur) Pada Tanggal 9 Desember 2004
Wawancara dengan Wardiono (Kepala Dusun, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Pada Tanggal 5 Januari 2005

